

SEJARAH PERJALANAN MARHAENISME AJARAN BUNG KARNO

Tito Zeni Asmara Hadi

Pusat Kajian Marhaenisme Bandung, Indonesia

Email : tito.asmarahadi47@gmail.com



Abstrak

Tulisan ini merupakan sebuah penelusuran jejak pemikiran dan praktik historis, sosial, dan politik ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme. Ajaran Marhaenisme Bung Karno merupakan sebuah upaya radikal untuk mendorong persatuan dan kesatuan dalam rangka melawan imperialisme dan kapitalisme. Ajaran ini lahir dari pengumpulan Bung Karno sejak muda dalam konteks penjajahan. Bung Karno dengan ajaran ini mau mengatakan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan basis penting melawan realitas keterjajahan tersebut. Walaupun perjuangan untuk cita-cita itu membawa Bung Karno ditangkap Pemerintahan Hindia Belanda dijatuhi hukuman sampai mengalami pembuangan. Melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo) Bung Karno memperjuangkan dan menerjemahkan gagasan politiknya. Politik dalam konteks ajaran Bung Karno merupakan upaya menyusun kekuasaan yang terpikul oleh ide.

Kata kunci: *Marhaenisme, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, Sukarno, Marxisme*

Pendahuluan

Apabila kita sebagai penganut ajaran Bung Karno, seorang Marhaenis, maka kita sudah puas bila ajaran Bung Karno tidak dilarang, dan sudah tentu yang dimaksud dengan ajaran itu adalah teori-teorinya dan pandangan tentang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Memang dunia ini Tuhan ciptakan seperti padang Kurusetra, medan perjuangan untuk menguji kita sebagai manusia, siapa yang beriman, dan siapa yang tidak. Tapi kita harus melakukan peran tergantung kepada takdir baik dan buruk. Kita tidak tahu apakah masih ada golongan yang menuntut supaya semua ajaran Bung Karno dilarang seperti di masa pemerintahan orde Suharto dimana ada upaya de-sukarnoisasi (Kusuma, 2004:2). Ajaran-ajarannya itu bersifat ilmiah dan akan berubah seturut zamannya. Oleh karena itu, janganlah kita berpikir dogmatis namun juga juga harus rela

melepaskan apa yang tidak sesuai lagi (Sukarno, 2016:274). Tetapi semua itu setelah melalui pemikiran yang tenang, ternyata ajaran Bung Karno itu masih valid dan berlaku pada jaman kini, maka kita akan terus berjalan didalam cahayanya. Di tengah persoalan bangsa yang semakin kompleks maka berpaling kepada pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa termasuk Bung Karno merupakan suatu keniscayaan (Siswo, 2014: viii). Marhaenisme merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membangkitkan semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia Merdeka, dan kita tidak akan bisa melepaskan diri dari sejarah.

Partai Politik dan cita-cita Marhaenisme

Dua partai yang pernah Bung Karno pimpin, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo). Kedua partai ini menyatakan diri berazaskan Marhaenisme. Ketika dijatuhkan vonis hukuman penjara kepada Bung Karno, Gatot Mangkupradja, Maskoen dan Soepriadinata oleh *Landraad* Pengadilan Kolonial Belanda, di Bandung pada tanggal 22 Desember 1930 PNI merupakan partai berasaskan Marhaenisme. Dampak vonis adalah munculnya pro-kontra didalam tubuh partai PNI saat itu tentang pembubaran PNI. Hal ini karena PNI oleh pemerintah dipandang mempunyai maksud melawan Pemerintahan Hindia Belanda yang dianggapnya suatu kejahatan.

Untuk itu diadakan konferensi mengambil keputusan dari golongan dan golongan yang menghendaki pembubaran mendapat suara mayoritas sehingga PNI pun dibubarkan. Pembubaran PNI itu dilaksanakan dengan diterbitkannya "Maklumat Pembubaran PNI" di Jakarta pada tanggal 25 April 1931 yang ditandatangani antara lain oleh Mr. Sartono, Ir. Anwari, S. Anggron Sudirdjo, Soewirjo, Ali Sastroamidjojo dan Mr. Sujudi. Sebagai gantinya didirikan sebuah partai yang diberi nama Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 29 April 1931 di bawah pimpinan Mr. Sartono. Namun demikian, kelompok yang anti pembubaran mempersatukan diri dalam satu kelompok, yang mereka beri nama Golongan Merdeka. Kelompok ini mendapat bantuan dan dukungan dari Bung Hatta dan Sutan Sjahrir yang pada saat itu berada di Belanda (Nederland). Setelah Bung Hatta dan Sjahrir kembali dari Nederland, mereka masuk kedalam PNI. Golongan Merdeka yang kemudian berubah menjadi Pendidikan Nasional Indonesia, meneruskan singkatan dari PNI. Waktu itu kedua partai tersebut, menunjukkan azas dan tujuan yang tidak berbeda, yaitu Azas : Kebangsaan, Kerakyatan dan Persatuan Indonesia. Tanggal 31 Desember 1931, Bung Karno dibebaskan dari penjara Sukamiskin dan dilihatnya bahwa Partai Nasional Indonesia yang dulu dibangunnya pada tanggal 4 Juli 1927, telah pecah menjadi dua partai yang saling hantam dan bertabrakan. Yang membuat Bung Karno sangat prihatin padahal Bung Karno sangat mendambakan adanya kesatuan dan persatuan.

Lebih kurang enam bulan memeras keringat untuk mempersatukan Pendidikan Nasional Indonesia dan Partai Indonesia tanpa menghasilkan persatuan yang diidamkan, karena keadaan mendesak maka timbulah keinsyafan dalam diri Bung Karno, bahwa tidak mungkin lebih lama lagi untuk tetap berpijak di atas dua partai. Bung Karno harus memilih dimana dia harus berada supaya dapat ikut memegang komando perjuangan kaum Marhaen walaupun hatinya masih tetap ingin melihat hanya satunya barisan kaum Marhaen hanya satu partai saja yang memimpin kaum Marhaen. Setelah lama berpikir Bung Karno memilih bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Pada tanggal 1 Agustus 1932, Bung Karno masuk dan menjadi anggota Partindo Cabang Bandung yang pada saat itu di pimpin oleh Gatot Mangkupradja. Di Partindo Bung Karno mendapat nomor anggota 205 dan untuk Ibu Inggit Garnasih dengan nomor anggota 206. Masuknya Bung Karno kedalam Partindo itu disertai dengan manifesto atau Maklumat No X, yang ditujukan kepada kaum Marhaen. Maklumat tersebut antara lain berisi :

"Enam bulan lebih lamanya saya bekerja untuk persatuan. Enam bulan lebih lamanya saya sengaja tidak duduk didalam satu partai, tak lain tak bukan hanya supaya usaha persatuan lebih gampang berhasil. Enam bulan lebih saya tidak ikut memegang komando perjuangan kaum Marhaen. Enam bulan lebih saya kadang-kadang mendapat sindiran dari orang orang yang tak

mempunyai rasa tanggung jawab yang mengeluarkan suara hanya untuk mengeluarkan suara. Enam bulan lebih saya mengejar saya punya cita-cita. Cita-cita saya itu yakni, satu barisan Marhaen yang radikal dan marhaenistis, kini belum terlaksana.”

“Kini sudah temponya saya kembali ikut memegang komando perjuangan Marhaen. Kini sudah temponya saya kembali ikut menyusun kekuasaan Marhaen, *Machtsvorming* Marhaen. Politik buat saya bukanlah pertama-tama menciptakan suatu ide, politik buat saya ialah menyusun suatu kekuasaan yang terpikul oleh ide. Hanya *machtsvorming* yang terpikul oleh ide itulah yang bisa mengalahkan segala musuh kaum Marhaen.” (Sukarno, 2016:139)

Marhaenisme versus Marxisme

Kini banyak orang memanggil saya untuk kembali ke “*practischepolitiek*”. Juga *zonder* panggilan itu saya niscaya kembali ke *practische politiek*. Ya, sebenarnya sejak keluarnya saya dari penjara Sukamiskin, saya sudah kembali ke *practische politiek*, yakni mulai mengusahakan persatuan Marhaen. Kini lebih tegas lagi, kini mulai saya masuk salah satu partai, kini saya masuk Partai Indonesia, kini orang bisa lihat di mana Bung Karno duduk.

Pada tanggal 14 sampai dengan 19 April 1933, Partindo melangsungkan Kongres kedua di Surabaya dan Bung Karno terpilih menjadi Ketua Umum Partindo dan wakilnya adalah Mr. Sartono. Di dalam Kongres tersebut para pemimpin, para orator dari Partindo memeras energinya, seakan mereka sudah tahu bahwa di jaman penjajahan Belanda inilah kesempatan terakhir bagi Partindo untuk berkongres dan kongres itulah kesempatan terakhir bagi mereka bertukar pikiran tentang azas, tujuan, strategi dan taktik. Di kongres ini pula diambil keputusan untuk mengganti istilah azas yang selama ini berbunyi Kebangsaan, Kerakyatan dan Persatuan Indonesia dengan satu istilah saja, yaitu Marhaenisme.

Penggantian itu bukan hanya penggantian sebuah istilah yang lain. Bukan hanya sekedar penggantian nama dengan nama yang lain. Tapi penggantian itu adalah penegasan suatu ideologi, yakni ideologi Marxisme, sebagai pisau analisis untuk mengupas dan membedah keadaan di dalam masyarakat yang menyangkut politik, ekonomi dan sosial. Alat media untuk melakukan propaganda adalah Majalah Mingguan yang bernama “FIKIRAN RA’JAT” dan Bung Karno menjadi pimpinan redaksi. Kantor Redaksi bertempat di Jalan Astana Anyar No. 274. (kemudian hari jalan tersebut berubah menjadi Jalan Ciateul No. 8 dan sekarang menjadi Jalan Ibu Inggit Garnasih No. 8). Untuk menampung para pemuda dari daerah yang ingin ikut dalam pergerakan dan menimba ilmu politik dari para pemimpinnya maka didirikan “Asrama Indonesia” yang dipimpin Asmara Hadi. Dibentuk pula barisan pemuda yang diberi nama “Pemuda Gempar” (Pemuda Gemblengan Partindo).

Pada tanggal 7 dan 8 Juli 1933, Partindo melangsungkan konferensinya di Mataram Yogyakarta. Dalam konferensi itu lahirlah “Sembilan Tesis Marhaenisme” yang merupakan rumusan atau patokan untuk melaksanakan Marxisme di Indonesia, disamping nama Bung Karno, patut pula disebut nama Ki Soewandi seorang guru Taman Siswa yang banyak berjasa dalam pemikiran tentang Marhaenisme. Kalau Bung Karno melahirkan istilah Marhaenisme, maka Ki Soewandi melahirkan nama Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Marhaenisme menunjukkan tinjauan dunia dan filsafat perjuangan kaum Marhaen sebagai suatu keseluruhan, menunjukkan perjuangannya sebagai aliran yang tak terputus, berkesinambungan. Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi menunjukkan tahapan yang harus dilalui kaum Marhaen didalam perjuangannya. Tahapan Sosio Nasionalisme terutama sekali sebelum dan di atas jembatan emas Indonesia Merdeka. Sedangkan Sosio Demokrasi terutama sekali sesudah melewati jembatan emas Indonesia Merdeka, sesudah Kemerdekaan penuh dalam pembangunan Sosialisme.

Pada tanggal 31 Juli 1933, Bung Karno dan Bung Gatot Mangkupradja berangkat ke Jakarta untuk menghadiri rapat Pengurus Besar Partindo. Dan pada saat itu, Bung Karno

ditangkap oleh Polisi Belanda dirumah M.H. Thamrin pada tanggal 1 Agustus 1933. Tidak lama kemudian Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan beberapa Pengurus Besar Pendidikan Nasional Indonesia ditangkap pula. Untuk Bung Karno peristiwa penangkapan ini bukan lagi vonis penjara yang dijatuhkan kepada para tokoh tersebut, tapi pembuangan ke Ende Flores. Bung Karno beserta keluarga yang terdiri dari Ibu Inggit, Ratna Juami, Ibu Amsi (ibundanya Ibu Inggit) dan dua orang pembantu yaitu Karmini dan Encon Muhasan. Nasib yang sama juga dialami oleh Bung Hatta dan Bung Sjahrir diasingkan ketempat pembuangannya di Digul. Sejak itu Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan larangan untuk berkumpul dan mengadakan rapat. Datanglah kegelapan malam dan kesunyian di arena perjuangan.

Didalam masa krisis politik, pimpinan Partindo berpindah dari angkatan tua ke tangan angkatan muda yang merasa pundaknya lebih kuat untuk memikul tanggung jawab, mereka buktikan kesetiaan kepada partai, kepada Marhaenisme dan kepada kawan seperjuangan. Semua instruksi partai mereka jalankan dengan sebaik-baiknya meskipun mereka tahu keadaan penuh dengan bahaya karena spion-spion Belanda selalu mengawasi mereka. Setelah Bung Karno ditangkap oleh pihak Belanda, Ketua Umum Partai dipegang oleh Soediro, dibantu oleh Soetomo Djohar Arifin seorang pujangga muda sebagai Sekjen dan Darmodisastro sebagai Wakil Ketua Partai. Sidik Djojokusarto menjalankan tugas sebagai pembantu umum Pengurus Besar, Sutojo Alamsyah seorang agitator muda yang meninggal dalam peristiwa Madiun. Demikian juga Amir Sjarifuddin seorang pemimpin brilian yang meninggal karena peristiwa Madiun yang dieksekusi pada tahun 1947 di Yogyakarta atas perintah Gatot Subroto yang pada waktu itu sebagai Gubernur Militer. Sedangkan, Nyotoprawoto seorang pemimpin sederhana, Ismangun Winoto seorang marhaenis yang militan setia kepada kawan dan cita-cita, hilang tak tentu rimbanya dalam *clash* kedua. Sutan Besar, Pamudji yang harus melepaskan nyawanya dalam penjara Jepang, Saleh Rais yang setia kepada partai dan dibuang ke Digul pada tahun 1937 dan meninggal dalam pembuangan. Sabran dibunuh oleh fasis Jepang di Pontianak, M. Djoni agitator Banteng Gemuk yang tidak tahu arti takut dan gentar membayar kesetiannya kepada Marhaenisme dengan penjara dan pengasingan di Digul dan meninggal pada tahun 1962 di posnya sebagai pimpinan Partindo.

Akhirnya semua alat yang legal tidak ada lagi dalam tangan Partindo. Harian "Indonesia Berjuang" yang merupakan satu-satunya alat yang legal setelah pelarangan rapat dan berkumpul, dilarang terbit, percetakannya disita dan redaksinya dimasukan kedalam penjara, setelah melalui perundingan yang ilegal tentunya, maka diambilah keputusan untuk memberhentikan/ membekukan semua kegiatan Partindo. Keputusan ini diumumkan pada tanggal 31 Juli 1936. Adalah tidak benar yang dikatakan oleh Karim Pringgodigdo dalam buku "Sejarah Pergerakan Nasional", bahwa Partindo dibubarkan oleh Sartono SH. Karena pada tahun 1936 Sartono SH sudah tidak aktif lagi dalam pimpinan partai, meskipun dibelakang layar masih tetap memberikan bantuan bahkan menganjurkan untuk tidak membubarkan Partindo. Untuk menampung marhaenis-marhaenis dan para pejuang lainnya dibutuhkan suatu wadah berbentuk partai. Maka setelah melalui pembicaraan dan perundingan pendahuluan, pada tanggal 24 Mei 1938 diadakanlah suatu pertemuan di Club Indonesia di Jakarta. Yang hadir dalam pertemuan itu antara lain : Amir Sjarifuddin, Muhamad Yamin, Sumanang, Anggron Sudirdjo, Nyotoprawoto, Sanusi Pane, Sutan Besar, A.K. Gani, Asmara Hadi, S.K. Trimurti, Wilopo dan yang lainnya. Asmara Hadi yang mengikuti Bung Karno di Ende dari pertengahan 1934-1935 mendapat amanat dari Bung Karno sewaktu di Ende untuk menghimpun Marhaenis dan yang lainnya untuk meneruskan perjuangan. Diskusi yang berjalan melahirkan keputusan bahwa sangat diperlukan adanya satu partai rakyat yang cara kerjanya atau taktiknya haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlaku pada waktu itu di Tanah Air.

Perundingan dilaksanakan dan atas usul Amir Sjarifuddin partai tersebut diberi nama "Gerakan Rakyat Indonesia" atau Gerindo. Pada waktu diadakan pemilihan pengurus timbul kesulitan karena banyak diantaranya yang tidak bersedia memikul tanggung jawab menjadi

pengurus namun akhirnya terbentuklah susunan Pengurus Besar Gerindo, yang terdiri dari Ketua Umum A.K. Gani, Sekjen Asmara Hadi merangkap sebagai ketua Badan Propaganda dan Penerangan dan Pimpinan Redaksi “Pelopor Gerindo”, Bendahara Sutan Besar, dan beberapa orang lagi yang bersedia menjadi pembantu antara lain, S.K. Trimurti, Wilopo, Soediro, Adam Malik dan Wikana.

Di Indonesia Revolusi Nasional itu dimulai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, beberapa hari setelah Proklamasi itu, disebuah ruangan di Gedung Pejambon dipinggir kali Ciliwung, Bung Karno menyusun sebuah pidato yang akan diucapkan kepada rakyat Indonesia. Yang membantu menyusun pidato itu adalah Soediro, Sayuti Melik dan Asmara Hadi. Didalam pidato itu antara lain Bung Karno menganjurkan supaya kita membangun satu partai. Satu Partai Nasional! Partai itu adalah mutlak untuk menghimpun tenaga Revolusioner dan untuk memberi pimpinan kepada revolusi. Jangan lebih dari satu partai, berarti membagi tenaga. Jangan lebih dari satu pimpinan, sebab lebih dari satu pimpinan akan membingungkan rakyat.

Waktu itu sudah ada pembicaraan untuk mengaktifkan kembali Partindo atau Gerindo sebagai badan yang menjalankan Marhaenisme Ajaran Bung Karno. Tapi sayangnya kata sepakat tidak diperoleh. Dan para marhaenis pun akhirnya menyebar ke berbagai partai, antara lain masuk kedalam PNI, sebagian lagi masuk kedalam Partai Sosialis yang kemudian melebur diri kedalam PKI dan beberapa masuk kedalam Partai Murba.

Pada tahun 1950-an sudah ada perasaan, pikiran dan pembicaraan di antara Marhaenis yang pada waktu itu berada dalam wadah PNI, yang menyatakan bahwa Tanah Air dan rakyat sangat memerlukan suatu Partai yang bertubuh Nasionalisme, berjiwa Sosialisme, berotak Marxisme dan berjangtung religi, untuk menjaga supaya Revolusi kita tetap berjalan di Garis Umum, diatas relnya yang sebenarnya, tidak menyeleweng kekanan atau kekiri, supaya sampai kepada tujuannya, yakni keselamatan rakyat. Dan partai yang demikian itu hanyalah bisa dibangun di atas fundamen Marhaenisme Ajaran Bung Karno. Akhirnya pada tahun 1958, Bung Karno memanggil Winarno (Gubernur Sumatra Selatan dari PNI), Asmara Hadi dan Winoto Danu Asmoro di Istana Bogor. Di situ Bung Karno meminta untuk membangkitkan kembali Partindo. Karena Bung Karno menilai PNI, tidaklah menjalankan Marhaenisme Ajaran Bung Karno, PNI sekarang bersemangat borjuis dan feodal.

Di bulan Juni dan Juli tahun 1958 Asmara Hadi menguraikan mengenai Marhaenisme itu sesungguhnya adalah Marxisme yang diIndonesiakan “Marxisme yang diselenggarakan di Indonesia” yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan sejarah Indonesia. Marhaenisme Ajaran Bung Karno, berpedoman pada Panca Sila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa. Artikel tersebut dimuat di harian Sin Po.

Bersamaan dengan itu Sayuti Melik dari PNI membantah pendapat Asmara Hadi, dan tulisan itu dimuat dalam harian Sulindo sebanyak 20 artikel. Untuk mendapat kepastian maka anggota PNI menghadap Bung Karno ke Istana Bogor pada tanggal 24 Agustus 1958. Untuk menanyakan sendiri kepada Bung Karno dan Bung Karno pun menegaskan bahwa memang Marhaenisme itu adalah Marxisme, yakni Marxisme yang diselenggarakan di Indonesia, dan untuk bisa memahami Marhaenisme, kita lebih dahulu harus benar benar dan banyak mempelajari Marxisme, karena Marxisme adalah ilmu sosial yang tidak berbeda dengan ilmu sosial yang lainnya.

Marhaenisme adalah hasil pemikiran yang lahir dari kandungan otak dan hati Bung Karno, oleh karena itu hanya Bung Karnolah yang tahu betul apa itu Marhaenisme. Kalau Bung Karno mengatakan bahwa Marhaenisme itu adalah Marxisme yang diselenggarakan di Indonesia, maka itu semua harus kita terima. Ada orang atau golongan yang berpendapat bahwa Marhaenisme itu bukan Marxisme yang diselenggarakan di Indonesia, maka itu bukanlah Marhaenisme ajaran Bung Karno. Mengapa harus dinyatakan Marhaenisme Ajaran Bung Karno?

Karena adanya penafsiran dan pengertian yang kontradiksi tentang Marhaenisme diantara orang-orang yang menyebut dirinya Marhaenis.

Partindo dibangkitkan kembali pada tanggal 1 Agustus 1958, setelah di non-aktifkan pada tanggal 31 Juli 1936 dimasa kolonial Belanda. Tertidur selama 22 tahun lamanya. Pengumuman kebangkitan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus malam bertempat di Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur. Awalnya yang menjadi Ketua Umum adalah Winarno dan Asmara Hadi sebagai Ketua Bidang Ideologi dan Politik, namun atas desakan dan usul dari para pengurus, meminta Asmara Hadi yang menjadi Ketua Umum. Dengan pertimbangan karena Winarno merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatra Selatan. Para Pengurus Besar Partindo antara lain, Winoto Danuasmoro, Adisumarto, Supardi, A.M. Hanafi, Ki Werdoyo, Asnawi Said, Rustama, Barus, Suharto Rebo, Sardjono, Oey Tjoe Tat, Sumarsono, Armunanto, Dr. Buntaran, Setiadi, Sibarani, Djon Pakan dan yang lainnya memilih Asmara Hadi menjadi ketua Partindo.

Ada beberapa partai yang meleburkan diri bergabung ke dalam Partindo, antara lain, partai Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) yang dipimpin oleh Ki Werdoyo dan Rustama, partai Adat Rakyat Minangkabau, Kongres Rakyat (A.M. Hanafi dan Armunanto) dan partai Persatuan Dayak Kalimantan (Oevang Oerai). Usaha Partindo dalam menegakan Marhaenisme Ajaran Bung Karno, mendapat tantangan dan perlawanan sengit dari Marhaenis yang belum mengerti dengan berbagai tuduhan seperti ateis, antek komunis dan lain sebagainya, namun demikian juga halnya lambat laun timbul juga pengakuan akan kebenaran Partindo. Pengakuan bahwa Marhaenisme Ajaran Bung Karno itu adalah Marxisme.

Di kalangan PNI pun akhirnya melakukan pengakuan akan kebenaran bahwa Marhaenisme Ajaran Bung Karno itu adalah Marxisme yang dipelopori oleh Ketua Umumnya sendiri Ali Sastroamidjojo SH. Dalam Deklarasi Marhaenisme yang merupakan hasil Kongres PNI ke X di Purwokerto tanggal 28 Agustus 1963. Mengakibatkan perpecahan dalam tubuh PNI, antara kubu Ali – Surachman dan kubu Osa Maliki – Usep Ranuwijaya. Pada tanggal 1-7 Juli 1964, Pengurus Besar Partindo melaksanakan Sidang Plenonya yang ketiga di Bandung. Pada saat itu juga dibuat keputusan bahwa Marhaenisme Ajaran Bung Karno adalah Marxisme-Soekarnoisme. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian kebetulan atau tanpa sengaja, setiap kejadian pasti ada sebabnya. Sebabnya itu bersifat nasional dan internasional, berakar di dalam negeri sendiri dan di luar negeri. Di dalam negeri pada saat itu garis politik Bung Karno memperoleh kemenangan dan kekuatan, garis politik Bung Karno adalah penerapan dari Marxisme.

Di luar negeri, ajaran Marxisme pada saat itu sudah menjadi ajaran yang universal, politis di dalam watak internasionalnya. Dengan menegakan bendera Marxisme-Soekarnoisme, merupakan penegasan watak dan tempat di dalam Kubu Marxis Internasional. Kalau kita memberikan nama seseorang besar kepada suatu kejadian atau suatu aliran politik, seni atau aliran agama, maka kita akan mengkaitkan kepada kejadian atau aliran itu adalah sikap, pendirian dan pandangan orang itu yang memancar dari wataknya. Watak dan kejadian, pembawaan dan kenyataan, Bung Karno adalah politikus, politikus dalam format yang besar. Sejak mudanya dia berjuang untuk memperoleh pimpinan, untuk mendapatkan kekuasaan, bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kaum Marhaen. Sebagai pejuang dan politikuslah Bung Karno akan hidup terus di dalam sejarah dan di dalam hati generasi yang masih akan lahir. Karena itu, kalau kita menyebut Sukarnoisme maka yang dimaksud itu adalah sikap politik, pendiriannya dengan manifestasinya dalam perjuangannya.

Di penghujung tahun 1965 tepatnya di bulan September meletus peristiwa *coup d'etat* yang oleh Sukarno disebut Gerakan Satu Oktober (GESTOK) dan oleh orde Suharto disebut G30S yang diberi akronim GESTAPU (Onghokham, 2013: 153) merupakan awan hitam yang menyelimuti bangsa dan negara Indonesia. Laksana gelombang tsunami yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan berpolitik, terlebih lagi hilangnya rasa kemanusiaan dengan mengakibatkan ribuan bahkan mungkin jutaan korban jiwa serta penjara dan pembuangan yang

tidak melalui proses pengadilan. Sejarah yang kelam yang ditulis dengan tinta darah bangsa sendiri. Peristiwa itu terjadi tidak lepas dari campur tangan Imperialis dengan ditempatkannya Marshal Green (CIA) sebagai Duta Besar Amerika untuk Indonesia yang dibantu oleh agen agennya yang berada di Indonesia.

Padahal banyak di antara mereka yang dahulunya ikut berjuang mendirikan republik ini tidak pernah bekerja menjadi kaki tangan kolonial Belanda. Dalam situasi yang penuh dengan kemelut dan misteri, Bung Karno terpaksa mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1966 kepada Mayjen Suharto, yang pada akhirnya digunakan untuk menjatuhkan Bung Karno. Padahal menurut perkataan Bung Karno sendiri bahwa Surat Perintah Sebelas Maret itu bukanlah pengalihan kekuasaan melainkan antara lain untuk pengamanan, menjaga pribadi Presiden, menjaga wibawa Presiden, dan menjaga ajaran Presiden.

Supersemar yang diartikan lain dan diselewengkan oleh orde Suharto membawa dampak besar selama 32 tahun sejarah Bangsa Indonesia. Kebijakan politik orde Suharto selain membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), juga pada tahun 1967 membekukan Partindo, sedangkan PNI, telah terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Ali-Surachman dan kubu Osa-Usep oleh orde Suharto hanya diakui kubu Osa Maliki dan Usep Ranuwidjaja. Partindo dan PNI Ali-Surachman dianggap akan membahayakan bagi sistem yang akan dibangun oleh orde Suharto dan yang secara konsekuen membela Bung Karno beserta ajarannya. Ajaran itu bernama MARHAENISME. Simpanlah Api Marhaenisme dalam dada dan jangan abunya !! Marhaen Berjuang!

Kesimpulan

1. Marhaenisme Ajaran Bung Karno adalah Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi. Marhaenisme adalah prinsip politik atau fundamen politik, tempat dimana tumbuhnya ide ide baru atau pandangan politik baru yang semuanya bersumber kepada Marhaenisme. Sosio Nasionalisme terutama sekali dilaksanakan pada waktu kita merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan Sosio Demokrasi dilaksanakan pada saat kita telah melewati Jembatan Emas Kemerdekaan, dimana Kedaulatan Politik dan Kedaulatan Ekonomi harus berada ditangan Rakyat Marhaen. Karena Marhaenisme adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negara yang didalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen. Dan Marhaenisme adalah azas yang progresif revolusioner yang menghendaki hilangnya Feodalisme, Kolonialisme, Kapitalisme dan Imperialisme.
2. Marhaenisme Ajaran Bung Karno, adalah Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi dan itu sama dengan Sosialisme. Jadi Marhaenisme itu adalah Sosialisme. Karena Demokrasi politik saja tidak bisa memberi keselamatan kepada kaum Marhaen. Negara Indonesia Merdeka haruslah berbentuk Republik (*Res Publica* berarti urusan bersama) , Republik Politik Sosial. Kalau Republik Politik saja yang menjadi urusan bersama, persaman yang hanya berlaku di lapangan politik. Persamaan itu harus disambungkan terus sampai kelapangan kehidupan masyarakat seluruhnya, kelapangan kehidupan sosial ekonomi (Sosio Demokrasi).
3. Marhaenisme Ajaran Bung Karno, walaupun Marxisme merupakan apinya yang menyala dalam Marhaenisme, tetapi Bung Karno menyingkirkan dalil dalil Marxisme Leninisme dengan teori perjuangan kelas. Karena untuk Indonesia teori ini tidaklah berlaku, karena susunan masyarakat Indonesia jelas bukan terdiri dari kelas-kelas, melainkan terdiri dari

masyarakat Marhaen, rakyat yang disengsarakan akibat tindakan kolonialisme dan Imperialisme. Bagi Bung Karno, Marxisme adalah Sosiologi, yaitu ilmu untuk menemukan hukum hukum yang menggerakkan masyarakat dan sejarah, supaya bisa merubah masyarakat dan bertindak aktif dan tepat di dalam masyarakat.

4. Marhaenisme Ajaran Bung Karno adalah Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi, dalam Sembilan Tesis Marhaenisme yang Bung Karno tegakan pada Konferensi Partindo pada tanggal 7 dan 8 Juli 1933 di Mataram Yogyakarta. Bila kita bandingkan dalam Lahirnya Panca Sila pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan apabila diperas menjadi Tri Sila, yaitu Sila pertama Sosio Nasionalisme, Sila kedua Sosio Demokrasi dan Sila ketiga Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di dalam Panca Sila, menyala jiwa dan semangat Marhaenisme sebagai aspek lahir dari Panca Sila, sebagai teori politik dan teori perjuangan dan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan aspek batinnya sebagai tuntunan moral dalam kita bertindak melaksanakan Panca Sila.
5. Marhaenisme Ajaran Bung Karno, menggunakan Marxisme itu sebagai sosiologi, alat untuk memahami alam dan masyarakat, kemudian melakukan tindakan berdasarkan hukum hukum obyektif yang berlaku. Marxisme adalah ilmu sosial dan metode untuk menganalisa masyarakat dan sejarah. Fondasi dan tiang dari bangunan Marxisme adalah "Historis Materialisme" berbeda dengan "Materialisme" dalam filosofi (*wijsgerig*) materialismenya Fierbich. Filosofi materialisme akan memberikan jawaban bagaimana hubungan antara pikiran (*denken*) dengan benda (materi). Sedangkan Historis Materialisme memberi jawaban atas soal sebab apakah pikiran itu terjadi/timbul pada suatu jaman tertentu. Filosofis Materialisme menanyakan adanya (*wezen*) pikiran itu. Sedangkan Historis Materialisme menanyakan sebab sebabnya pikiran itu berubah. Filosofis Materialisme mencari asal pikiran, sedangkan Historis Materialisme mempelajari tumbuhnya pikiran itu. Historis Materialisme berlaku dibidang sejarah manusia, namanya saja "Historis" yang berarti sejarah. Arti Materialisme dalam Historis Materialisme bukan berarti paham menyembah kepada benda atau mempertuhankan benda atau materi. Arti sebenarnya dari Materialis adalah orang yang mengakui dan memahami hukum obyektif yang ada hubungannya dengan materi dan bertindak menurut hukum obyektif. Bukankah Tuhan itu menciptakan alam semesta ini semuanya berupa materi dan menurunkan pula hukum hukum obyektif terhadap semua aspek materi untuk pertumbuhannya. Seperti halnya bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari atau gaya tarik bumi. Tuhan dalam menciptakan alam semesta dengan kata bersamaan pula dengan hukum hukum obyektif. Pada setiap aspek bekerja bekerja hukum hukum yang berlaku untuk aspek itu saja. Tuhan didalam Maha Kebijaksanaannya, dalam aspek materia menaruhkan hukum hukum yang materia pula sifatnya. Didalam masyarakat manusia yang berdasarkan hubungan ekonomi itu menaruhkan pula hukum hukum yang bersifat ekonomi, yang ditemukan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, dan hukum itu kemudian dikenal dengan nama "Historis Materialisme".
6. Marhaenisme Ajaran Bung Karno, sebagai azas berpedoman kepada Panca Sila. Karena Panca Sila adalah Dasar negara, Falsafah bangsa dan sumber dari segala hukum. Panca Sila adalah filsafat hidup politik dan sosial. Tidak ada satu Sila pun dari Panca Sila itu yang bisa dilaksanakan tanpa harus berhadapan dengan Kapitalisme dan Imperialisme.

Daftar Pustaka

- Hadi, A. (1961). *Sembilan Tesis Marhaenisme dan Pendjelasan Singkatnja*, Jakarta: PB Partindo
- Hadi, A. (1963). *Di Bawah Bendera Marhaenism*, Jakarta: PB Partindo
- Hadi, A. (1964). *Kibar Tinggi Panji Marhenisme*, Jakarta: PB Partindo
- Hadi, A. (2022). *Tentang Pancasila*, Bandung: Yayasan Ibu Inggit Garnasih
- Kusuma, A.B.K, RM. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI
- Onghokham. (2013). *Sukarno Orang Kiri Revolusi & G30S 1965*, Jakarta: Komunitas Bambu
- Siswa, I (penyunting). (2014). *Panca Azimat Revolusi-Jilid 1*, Jakarta: KPG
- Soekarno. (2016). *Di Bawah Bendera Revolusi-Jilid 1*, Jakarta: Banana Books